

**PERLAWANAN MASYARAKAT LUAR BATANG JAKARTA
TERHADAP KEBIJAKAN REVITALISASI KAWASAN PESISIR PADA
TAHUN 2016**

Alief Khahfi Fhatoni, Purwoko, Nur Hidayat Sardini
Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Dalam beberapa waktu terakhir, variasi, frekuensi dan intensitas gerakan perlawanan semakin kompleks. Terdapat ketidakadilan yang membuat masyarakat melakukan perlawanan seperti pada perlawanan masyarakat Luar Batang Jakarta terhadap kebijakan revitalisasi kawasan pesisir. Perlawanan masyarakat Luar Batang dikarenakan mereka menginginkan kampung ini tidak ditertibkan oleh pemerintah melainkan dijaga dan dilestarikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika perlawanan masyarakat Luar Batang Jakarta terhadap kebijakan revitalisasi kawasan pesisir dan faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan perlawanan tersebut

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Informan pada penelitian ini adalah Aktor Perlawanan dari masyarakat Luar Batang, beberapa masyarakat Luar Batang yang terkena dampak kebijakan revitalisasi dan Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat Luar Batang adalah perlawanan secara tim (*Team Work*) terbagi atas 3 tugas yaitu mendukung masyarakat, mengumpulkan bukti surat hak atas tanah, dan membangun jaringan lintas sektoral. Dengan pembagian tugas tersebut tercipta 3 bentuk perlawanan masyarakat Luar Batang yaitu aksi massa, jalur hukum dengan memperjuangkan hak atas tanah, dan diplomasi. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat Luar Batang untuk melakukan perlawanan adalah faktor historis, agama, hak atas tanah, dan kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk pemerintah adalah ketika dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan harus melibatkan masyarakat didalamnya sehingga masyarakat mengetahui tujuan dari kebijakan tersebut sehingga meminimalisir konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Kata Kunci: Perlawanan Masyarakat, Gerakan Sosial Baru dan Kebijakan

PENDAHULUAN

Perlawanan masyarakat setiap waktu semakin bervariasi seperti halnya perlawanan politik yang mana mempunyai pengertian gerakan perlawanan terhadap penguasa. Dalam beberapa waktu terakhir, variasi, frekuensi dan intensitas gerakan dan perlawanan politik semakin kompleks, tampak dari munculnya gerakan hak – hak sipil, hak politik dan gerakan reformasi di dunia termasuk Indonesia.

Dalam gerakan perlawanan lahir aktor – aktor yang terlibat untuk mendukung sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Aksi – aksi yang dilakukan para aktor gerakan sosial mempengaruhi dimensi lainnya seperti ekonomi, sosial dan budaya terhadap masyarakat lokal, nasional, dan internasional.

Secara teoritis, gerakan sosial adalah aksi kolektif melibatkan tipe – tipe yang bersifat relasionalitas konflik

sosial. Gerakan Sosial Menurut Giddens adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga yang telah mapan.¹ Tarrow, berpendapat gerakan sosial adalah gerakan perlawanan yang terjadi antara rakyat biasa yang bergabung dengan kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan elite, pemegang otoritas dan para komprador lainnya.²

Gerakan sosial baru dipahami sebagai dua hal. Pertama, suatu tipe gerakan sosial yang memiliki tampilan karakter yang baru dan bahkan mungkin unik. Kedua, gerakan sosial baru telah membawanya kepada status sebagai suatu

¹ Giddens, Anthony.1993. *Sociology*. Oxford: Polity Press Hlm. 642

² Tarrow, Sydney.1998. *Power in Movement, Social Movement and Contentus Politics*. Cambridge: Cambridge University Press Hlm. 4

paradigma (cara pandang terhadap suatu subjek permasalahan) dalam memahami kenyataan sosial itu sendiri. Berbeda dengan Gerakan Sosial menekankan pada upaya – upaya yang masif, maka Gerakan Sosial Baru menekankan pada perubahan – perubahan dalam gaya hidup dan kebudayaan dari pada mendorong ke arah perubahan spesifik seperti ekonomi. Salah satu Gerakan sosial baru yang sering terjadi adalah gerakan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat menjadi sasaran gerakan perlawanan ketika kebijakan itu dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan masyarakat. Seperti pada kebijakan revitalisasi kawasan pesisir Kampung Luar Batang Jakarta.

Pada 2013 penataan kawasan bantaran waduk Pluit yang dipenuhi oleh bangunan liar menutupi sebagian waduk

sehingga mempersempit dan memperkumuh kawasan, berlanjut dengan penataan bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Pulo yang setiap tahunnya langganan banjir, perbaikan terhadap ruang terbuka hijau menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga kawasan Kalijodoh ditata untuk memenuhi kawasan terbuka hijau di ibukota, terakhir yang masih sangat hangat terdengar yaitu pengusuran kawasan pesisir laut Kampung Luar Batang Penjaringan Jakarta Utara sampai dengan saat ini masih berlangsung, menariknya terdapat perlawanan dari masyarakat setempat mengenai pengusuran ini.

Kembali pada proses revitalisasi di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Camat Penjaringan Jakarta Utara, mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor 84/1.751.1. soal penertiban Kampung Luar Batang. Surat itu dikeluarkan tanggal 24 Maret 2016. Dari surat tersebut

diketahui, surat ditujukan ke pemilik bangunan, tempat usaha, penduduk pengontrak rumah di kawasan Pasar Ikan dan Luar Batang. Surat tersebut ditandatangani Camat Penjaringan Abdul Khalit. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan revitalisasi kawasan Sunda Kelapa, Museum Bahari, dan Luar Batang.

Tindakan itu sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi Wilayah, Instruksi Gubernur Nomor 36 Tahun 2013 tentang Refungsi Kali, sungai dan Waduk.

Selain itu sebagai bentuk realisasi dari Instruksi Gubernur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan dan penertiban di Sepanjang Kali, Saluran dan Jalur Inspeksi, Pergup Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua, dan

Instruksi Gubernur Nomor 8 tahun 2015 tentang kegiatan Penertiban Umum. Dalam surat tersebut terdapat empat instruksi kepada warga yakni Pertama, revitalisasi dilakukan dengan merelokasi warga yang memiliki bangunan tanpa izin tanah, membangun tanggul penahan air untuk menahan rob sekaligus menertibkan bangunan di atasnya. Kedua, pemilik bangunan yang berdiri di atas tanah milik pemerintah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan relokasi ke rusun yang disediakan. Ketiga, Penduduk pengontrak rumah diharapkan mempersiapkan diri mencari rumah tinggal dikawasan lain. Keempat. Warga dihimbau untuk membongkar bangunannya sendiri.

Dengan dikeluarkan surat pemberitahuan tersebut, warga melakukan penolakan dan pertentangan. Perlawanan masyarakat Luar Batang tidak dilakukan secara sendiri – sendiri melainkan pergerakan kolektif

untuk melawan kebijakan pemerintah. Dalam perlawanan tersebut muncul pula aktor – aktor perlawanan pada aksi masyarakat. Bentuk penolakan mereka diawali oleh terdapatnya sebuah spanduk di tembok salah satu rumah terkena dampak penertiban bertuliskan ”Jangan hancurkan kampung kami dengan uang” selain itu terdapat pula spanduk bertuliskan nada yang sama di berbagai sudut kampung. Tidak hanya sampai disitu gerakan perlawanan masyarakat berlanjut dengan diadakannya Rapat Terbuka pada Rabu 20 April 2016 dengan agenda untuk menyamakan tujuan yaitu menolak penertiban kawasan Luar Batang.

Berdasarkan kronologi diatas, dapat direfleksikan bahwa gerakan perlawanan masyarakat Luar Batang adalah gerakan kesadaran bersama tindakan kolektif tersebut membawa arah baru dalam melawan pemerintah yang berkuasa khususnya terhadap penertiban pemukiman penduduk. Isu gerakan

perlawanan masyarakat terhadap sebuah kebijakan pemerintah begitu beragam mulai dari perlawanan kaum buruh terhadap pemilik modal, perlawanan petani terhadap alih fungsi lahan hingga pada perlawanan masyarakat terhadap penertiban kawasan pemukiman penduduk. Tujuan dari gerakan sosial adalah perubahan sosial.

Peran gerakan sosial dalam mempengaruhi kebijakan publik sudah tidak diragukan lagi. Bahkan gerakan sosial sebagai kekuatan yang penting dalam masyarakat. Gerakan sosial sebagai salah satu cara utama menata ulang masyarakat modern, sebagai pencipta perubahan sosial, sebagai aktor historis, dan sebagai agen perubahan kehidupan politik atau pembawa proyek historis.

Perlawanan masyarakat Kampung Luar Batang merupakan bentuk ketidakpuasan dan kesewenangan pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan. Berawal dari ketidakpuasan gerakan

perlawanan atau gerakan sosial baru muncul. Ditambah dengan sumber daya dan peluang membuat sebuah mobilisasi untuk membuat gerakan kolektif yang memiliki tujuan bersama untuk melawan pemerintah.

Gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Biasanya gerakan sosial seperti itu mengambil bentuk dalam aksi protes atau unjuk rasa di tempat kejadian atau di depan gedung dewan perwakilan rakyat atau gedung pemerintah. Setelah Mei 1998, gerakan sosial semakin marak dan ketidakadilan atau ketidakpuasan yang muncul jauh sebelum 1998 dibongkar untuk dicari penyelesaiannya. Situasi itu menunjukkan bahwa dimana sistem politik semakin terbuka dan demokratis maka peluang lahirnya gerakan sosial sangat terbuka. Prespektif perilaku kolektif menyatakan gerakan sosial terjadi sebagai efek

samping dari transformasi sosial yang berlangsung cepat. Dalam kondisi perubahan sosial yang cepat, berkembangnya perilaku kolektif dalam bentuk berbagai sekte keagamaan, komunitas rahasia, kelompok politik, ekonomi-utopis merefleksikan dua hal yaitu Pertama, sebagai ketidakmampuan institusi-institusi dan mekanisme kontrol sosial memproduksi kohesi sosial. Kedua, sebagai upaya masyarakat bereaksi terhadap krisis situasi dengan keyakinan bersama sebagai landasan baru bagi solidaritas bersama.³

Berdasarkan problematika yang terjadi pada kebijakan revitalisasi Kampung Luar Batang Jakarta menjadi menarik untuk diteliti mengingat perlawanan masyarakat sampai dengan saat ini masih berlangsung terlebih lagi dikarenakan sikap perlawanan masyarakat terhadap tempat bersejarah tersebut. Oleh sebab itu maka penulis tertarik meneliti

³ Manalu, Dimpsos.2009.*Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik*.Gajah Mada University Press

masalah ini dengan judul **“Perlawanan Masyarakat Luar Batang Jakarta Terhadap Kebijakan Revitalisasi Kawasan Pesisir Pada Tahun 2016”**.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Informan pada penelitian ini adalah Aktor Perlawanan dari masyarakat Luar Batang, beberapa masyarakat Luar Batang yang terkena dampak kebijakan revitalisasi dan Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*)

Gerakan sosial baru dipahami sebagai dua hal. Pertama, suatu tipe gerakan sosial yang memiliki tampilan karakter yang baru dan bahkan mungkin unik. Kedua, gerakan sosial baru telah

membawanya kepada status sebagai suatu paradigma (cara pandang terhadap suatu subjek permasalahan) dalam memahami kenyataan sosial itu sendiri. Berbeda dengan Gerakan Sosial menekankan pada upaya – upaya yang masif, maka Gerakan Sosial Baru menekankan pada perubahan – perubahan dalam gaya hidup dan kebudayaan dari pada mendorong ke arah perubahan spesifik seperti ekonomi. Salah satu Gerakan sosial baru yang sering terjadi adalah gerakan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Dinamika Perlawanan Masyarakat Luar Batang Terhadap Kebijakan Revitalisasi

Perlawanan masyarakat Luar Batang terhadap kebijakan revitalisasi kawasan pesisir dilakukan dengan perlawanan tim (*Team Work*) terbagi atas 3 tugas *Pertama*, mengedukasi masyarakat dengan menjalin komunikasi

terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh – tokoh nasional, tokoh pergerakan, umat islam dan lain sebagainya sehingga tercipta rasa kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan perlawanan. *Kedua*, tugasnya mengumpulkan bukti – bukti surat kepemilikan hak atas tanah serta dikoneksikan kepada pengacara masyarakat Luar Batang yaitu Bapak Yusril Ihza Mahendra. *Ketiga*, membangun jaringan lintas sektoral dalam negeri maupun luar negeri sehingga Kampung Luar Batang mendapatkan dukungan untuk melakukan perlawanan, tidak heran kalau Kampung Luar Batang mendapat perhatian dari tokoh nasional, organisasi masyarakat, budayawan dan sejarawan.

Dengan pembagian tugas tersebut tercipta 3 bentuk perlawanan masyarakat Kampung Luar Batang *Pertama*, Aksi massa adalah bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Kampung Luar Batang terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara langsung dimulai dengan aksi pada tanggal 11 April 2016 bertepatan dengan penertiban

Kampung Aquarium, aksi menggunakan spanduk bernadakan penolakan dan melakukan dialog dengan aparat pemerintah. *Kedua*, melalui jalur hukum dengan memperjuangkan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat dengan pengacara Yusril Ihza Mahendra. *Ketiga*, diplomasi artinya membangun jaringan lintas sektoral untuk mendapatkan dukungan dan perhatian dari pihak luar sehingga pergerakan masyarakat Kampung Luar Batang dapat diketahui.

Dalam dinamika pergerakan masyarakat Kampung Luar Batang secara kolektif mereka membentuk sebuah wadah pergerakan yang bernama Laskar Kampung Luar Batang yang bertujuan *Pertama*, menjaga, merawat, dan melestarikan segala aset Shahibul Makam dan segala aset makam yang diakui secara hukum, diakui secara *de facto* dan *de jure*. *Kedua*, berfungsi sebagai pasukan yang menjaga secara fisik Kampung Luar Batang atas bahaya dari luar. Dengan adanya Laskar Luar Batang diharapkan

dapat menjadi pelindung bagi masyarakat Luar Batang.

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kampung Luar Batang Dalam Melakukan Perlawanan Terhadap Kebijakan Revitalisasi Kawasan Pesisir

Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi masyarakat Kampung Luar Batang dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan revitalisasi kawasan pesisir, 4 faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Historis

Kampung Luar Batang adalah sebuah kampung dengan sejarahnya yang panjang, masyarakat percaya kampung ini berdiri bersamaan dengan beroperasinya Pelabuhan Sunda Kelapa berarti sekitar abad ke 12. Luar Batang tidak dapat terpisahkan oleh Masjid Keramat Luar Batang yang berada di tengah kampung dengan ceritanya yang melegenda. Faktor historis ini yang menjadi pendorong bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan

terhadap kebijakan pemerintah, Kampung Luar Batang adalah sebuah kampung pusaka didalamnya terdapat kerukunan masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya seharusnya kampung ini dijaga dan dilestarikan bukan ditertibkan.

2. Faktor Agama

Mayoritas masyarakat Kampung Luar Batang beragama Islam yang didalamnya mengajarkan apabila kita mempertahankan hak yang menjadi milik kita adalah wajib, apabila dalam mempertahankan hak tersebut mereka meninggal adalah syahid. Masyarakat Kampung Luar Batang percaya perlawanan yang mereka lakukan ini adalah mempertahankan hak mereka yaitu tempat tinggal. Faktor agama menjadi pemersatu masyarakat Kampung Luar Batang mereka juga menjaga situs Masjid Keramat Luar Batang, perlawanan itu pula diawali oleh pergerakan di masjid ini.

3. Faktor Hak Atas Tanah

Dengan adanya kepemilikan hak atas tanah yang dipunyai oleh sebagian besar masyarakat Kampung Luar Batang menjadikan mereka berani melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Ketika mereka memiliki surat hak atas tanah otomatis mereka diakui secara hukum untuk memperjuangkan hak atas tanah miliknya.

4. Faktor Kebijakan

Faktor kebijakan menjadi faktor pendorong paling besar masyarakat untuk melakukan perlawanan. Masyarakat menganggap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merevitalisasi Kampung Luar Batang adalah kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, mereka mengetahui tujuan dari pemerintah untuk menertibkan mereka dikarenakan kampung mereka akan dijadikan ruang terbuka hijau dan sebuah plaza dimana itu hanya menguntungkan pembisnis, lalu masyarakat juga mengkritik

pemerintah soal kebijakan revitalisasi, mereka menganggap bahwa revitalisasi adalah memvitalkan kembali sebuah kawasan yang telah rusak bukan menggusur kampung.

3. Perbandingan Teori Gerakan Sosial Baru Dengan Kondisi Perlawanan Masyarakat Luar Batang Jakarta

Dalam Teori Gerakan Sosial Baru (New Social Movement) terdapat 5 ciri – ciri yaitu ideologi dan tujuan, taktik dan pengorganisasian, struktur gerakan, aktor dan partisipan, dan Medan atau area. Maka dengan hal tersebut akan dijelaskan perbandingan antara ciri – ciri Teori Gerakan Sosial Baru dengan kondisi perlawanan masyarakat Luar Batang Jakarta sebagai berikut :

1. Ideologi dan Tujuan

Dalam Gerakan Sosial Baru tidak terdapat ideologi yang kuat, pada dasarnya gerakan ini merupakan respon terhadap ketidakadilan yang biasanya disebabkan oleh Pemerintah dan memiliki tujuan bersama untuk

mencapai kondisi yang adil dan bermartabat. Dalam perlawanan masyarakat Luar Batang Jakarta masyarakat melakukan perlawanan secara kolektif yang semata – mata untuk melawan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mereka anggap merugikan masyarakat Luar Batang. Dalam perlawanan tersebut muncul agen – agen perubahan atau aktivis yang muncul dari tokoh – tokoh masyarakat Luar Batang seperti Daeng Mansur Amin selaku juru bicara masyarakat, Ketua Masjid Kramat Luar Batang Jakarta Bapak Faishal dan Bapak Sulaimansyah ketiga tokoh ini yang mengawali perlawanan masyarakat sehingga timbulah perlawanan kolektif yang diikuti oleh seluruh masyarakat Luar Batang Jakarta.

2. Taktik dan Pengorganisasian

Pada umumnya Gerakan Sosial Baru tidak lagi mengikuti model pengorganisasian serikat buruh atau politik kepartaian pergerakan lebih memilih saluran

di luar politik kepartaian, menggunakan taktik yang menggagu dan memobilisasi opini publik. Dalam perlawanan masyarakat Kampung Luar Batang tidak ada pengorganisasian secara formal disana masyarakat melakukan perlawanan untuk mempertahankan hak mereka yaitu mempertahankan kampung dari penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam Gerakan Sosial Baru pula bentuk perlawanannya cenderung menggunakan demonstrasi secara dramatis sehingga menimbulkan perhatian publik dan direncanakan dengan matang. Hal ini memiliki kesamaan dengan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Luar Batang, salah satunya dengan melakukan aksi demonstrasi yang di awali pada tanggal 11 April 2016 saat penertiban pada Kampung Aquarium yang terletak pada RW 11 Kecamatan Penjaringan Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara ini mengakibatkan bentrok

dengan aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP mulai dari sini masyarakat Kampung Luar Batang mendapatkan perhatian dari publik. Selain itu aksi demonstrasi dilakukan juga di Gedung KPK dan Gedung DPR RI.

3. Struktur dan Gerakan

Dalam struktur Gerakan Sosial Baru lebih mengalir dan tidak kaku untuk menghindari gaya yang oligarki. Mereka juga menggunakan format yang tidak birokratis singkatnya struktur Gerakan Sosial Baru menyerukan dan menciptakan struktur yang lebih responsif kepada kebutuhan – kebutuhan individu yakni struktur yang terbuka, terdesentralisasi, dan non hirarkis. Dalam perlawanan masyarakat Luar Batang tidak ada struktur yang mengikat mereka hanya ada pembagian tugas yaitu mendukasi masyarakat, mengumpulkan bukti – bukti Hak Atas Tanah dan membangun jaringan lintas sektrol. Dalam berjalannya waktu

untuk lebih mudah melakukan koordinasi masyarakat Kampung Luar Batang membentuk Laskar Kampung Luar Batang sebagai wadah untuk melakukan perlawanan, wadah ini tidak ada struktur organisasi yang kaku semua elemen masyarakat bisa bergabung asal mereka ingin memperjuangkan hak masyarakat Luar Batang.

4. Aktor dan Partisipan

Aktor dalam Gerakan Sosial Baru biasanya muncul sebagai aktivis perlawanan pada perlawanan masyarakat Luar Batang aktor yang menggerakkan mereka itu berasal dari tokoh masyarakat yang dituakan sedangkan partisipan adalah masyarakat Kampung Luar Batang ditambah relasi lintas sektoral yang mendukung pergerakan mereka seperti budayawan, politikus, sejarawan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Ulama dan sebagainya ini hasil dari

jaringan yang dilakukan oleh aktor perlawanan mereka.

5. Medan atau Area

Medan atau area bermain dari Gerakan Sosial Baru tidak terbatas seperti pada perlawanan masyarakat Kampung Luar Batang terdapat perhatian yang cukup besar dari berbagai kalangan kasus Luar Batang adalah kasus kecil namun keberadaan Luar Batang yang strategis di ibukota negara dan sejarahnya yang panjang membuat perlawanan ini menjadi perhatian publik sehingga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Bedasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinamika Perlawanan Masyarakat Luar Batang Terhadap Kebijakan Revitalisasi

Perlawanan masyarakat Luar Batang terhadap kebijakan revitalisasi kawasan pesisir dilakukan dengan perlawanan tim (*Team Work*) terbagi atas 3 tugas *Pertama*, mengedukasi masyarakat dengan menjalin komunikasi terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh – tokoh nasional, tokoh pergerakan, umat islam dan lain sebagainya sehingga tercipta rasa kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan perlawanan. *Kedua*, tugasnya mengumpulkan bukti – bukti surat kepemilikan hak atas tanah serta dikoneksikan kepada pengacara masyarakat Luar Batang yaitu Bapak Yusril Ihza Mahendra. *Ketiga*, membangun jaringan lintas sektoral dalam negeri maupun luar negeri sehingga Kampung Luar Batang mendapatkan dukungan untuk melakukan perlawanan, tidak heran kalau Kampung Luar Batang mendapat perhatian dari tokoh nasional, organisasi masyarakat, budayawan dan sejarawan.

Dengan pembagian tugas tersebut tercipta 3 bentuk perlawanan masyarakat Kampung Luar Batang

Pertama, Aksi massa adalah bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Kampung Luar Batang terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara langsung dimulai dengan aksi pada tanggal 11 April 2016 bertepatan dengan penertiban Kampung Aquarium, aksi menggunakan spanduk bernadakan penolakan dan melakukan dialog dengan aparat pemerintah. *Kedua*, melalui jalur hukum dengan memperjuangkan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat dengan pengacara Yusril Ihza Mahendra. *Ketiga*, diplomasi artinya membangun jaringan lintas sektoral untuk mendapatkan dukungan dan perhatian dari pihak luar sehingga pergerakan masyarakat Kampung Luar Batang dapat diketahui.

Dalam dinamika pergerakan masyarakat Kampung Luar Batang secara kolektif mereka membentuk sebuah wadah pergerakan yang bernama Laskar Kampung Luar Batang yang bertujuan *Pertama*, menjaga, merawat, dan melestarikan segala aset Shahibul Makam dan segala aset makam yang diakui

secara hukum, diakui secara *de facto* dan *de jure*. *Kedua*, berfungsi sebagai pasukan yang menjaga secara fisik Kampung Luar Batang atas bahaya dari luar. Dengan adanya Laskar Luar Batang diharapkan dapat menjadi pelindung bagi masyarakat Luar Batang.

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kampung Luar Batang Dalam Melakukan Perlawanan Terhadap Kebijakan Revitalisasi Kawasan Pesisir

Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi masyarakat Kampung Luar Batang dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan revitalisasi kawasan pesisir, 4 faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Historis

Kampung Luar Batang adalah sebuah kampung dengan sejarahnya yang panjang, masyarakat percaya kampung ini berdiri bersamaan dengan beroperasinya Pelabuhan Sunda Kelapa berarti sekitar abad ke 12. Luar Batang tidak dapat terpisahkan oleh Masjid Keramat

Luar Batang yang berada di tengah kampung dengan ceritanya yang melegenda. Faktor historis ini yang menjadi pendorong bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, Kampung Luar Batang adalah sebuah kampung pusaka didalamnya terdapat kerukunan masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya seharusnya kampung ini dijaga dan dilestarikan bukan ditertibkan.

2. Faktor Agama

Mayoritas masyarakat Kampung Luar Batang beragama Islam yang didalamnya mengajarkan apabila kita mempertahankan hak yang menjadi milik kita adalah wajib, apabila dalam mempertahankan hak tersebut mereka meninggal adalah syahid. Masyarakat Kampung Luar Batang percaya perlawanan yang mereka lakukan ini adalah mempertahankan hak mereka yaitu tempat tinggal. Faktor agama menjadi pemersatu masyarakat Kampung Luar

Batang mereka juga menjaga situs Masjid Keramat Luar Batang, perlawanan itu pula diawali oleh pergerakan di masjid ini.

3. Faktor Hak Atas Tanah

Dengan adanya kepemilikan hak atas tanah yang dipunyai oleh sebagian besar masyarakat Kampung Luar Batang menjadikan mereka berani melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Ketika mereka memiliki surat hak atas tanah otomatis mereka diakui secara hukum untuk memperjuangkan hak atas tanah miliknya.

4. Faktor Kebijakan

Faktor kebijakan menjadi faktor pendorong paling besar masyarakat untuk melakukan perlawanan. Masyarakat menganggap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merevitalisasi Kampung Luar Batang adalah kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, mereka mengetahui tujuan dari pemerintah untuk

menertibkan mereka dikarenakan kampung mereka akan dijadikan ruang terbuka hijau dan sebuah plaza dimana itu hanya menguntungkan pembisnis, lalu masyarakat juga mengkritik pemerintah soal kebijakan revitalisasi, mereka menganggap bahwa revitalisasi adalah memvitalkan kembali sebuah kawasan yang telah rusak bukan menggusur kampung.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

- Darmawan Tribowo, Gerakan Sosial : *Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, Hlm xv.
- Denzin, Norman K dan Yonna S Lincoln. 2009. *Hand Book Of Qualitative Reasearch*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 604
- Gidden, Anthony.1993. *Sociology*. Oxford: Polity Press Hlm. 642
- Hasab, B, Madjid 2010, *Dari Nabi Nuh Sampai Orang Hadramaut di Indonesia: Menelusuri Asak usul Hadharim*. Bania: Jakarta
- Kaelan. 2012 *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta; Paradigma. Hlm. 5
- Lexy J. Moeloeng. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm 247
- Lohanda, Mona. 2007. *Sejarah Pembesar Mengatur batavia*. Masup: Jakarta
- Manalu, Dimpsos.2009.*Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik*.Gajah Mada University Press
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian dan Teori dan Praktek*, Jakarta PT.Rineka Cipta, Hlm. 39
- Pichardo, Nelson A. 1997. *New Social Movements: A Critical Review. Annual*

Review Sociology, Vol 23,
pp 441-30

Tarrow, Sydney.1998. *Power in
Movement, Social
Movement and Contentus
Politics*. Cambridge:
Cambridge University Press
Hlm. 4

Sumber Jurnal :

Suharko (2006). *Gerakan Sosial
Baru di Indonesia:
Repertoar Gerakan Petani*.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UGM. Volume 10,
Nomor 1, Juli 2006, Hlm 1
– 34

Sumber Internet :

Anonim¹
[http://www.jakarta.go.id/w
eb/news/2008/01/Demogra
fi-Jakarta](http://www.jakarta.go.id/web/news/2008/01/Demografi-Jakarta) Diakses Pada
Tanggal 24 Maret 2017
Pukul 10.48 WIB

Anonim²
[http://www.beritasatu.com
/megapolitan/359554-ini-
kronologis-kericuan-di-
pasar-ikan-luar-](http://www.beritasatu.com/megapolitan/359554-ini-kronologis-kericuan-di-pasar-ikan-luar-batang.html)

[batang.html](http://www.beritasatu.com/megapolitan/359554-ini-kronologis-kericuan-di-pasar-ikan-luar-batang.html) Diakses Pada
Tanggal 24 September
2016 Pukul 22.54 WIB

Anonim³[http://megapolitan.kom
pas.com/read/2016/04/26/
18122621/Ini.Penawaran.
Warga.Luar.Batang.untuk.
Ahok](http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/26/18122621/Ini.Penawaran.Warga.Luar.Batang.untuk.Ahok) Diakses Pada
Tanggal 29 Maret 2017
Pukul 10.09 WIB

Sumber Skripsi :

Anggit Wicaksono (2014)
Perlawanan Masyarakat
Samin (Sedulur Sikep)
Atas Kebijakan
Pembangunan Semen
Gresik Di Sukolilo Pati
(Studi Kebijakan Berbasis
Lingkungan dan Kearifan
Lokal). Universitas Muria
Kudus

Sumber lain :

Badan Pusat Statistik Provinsi
DKI Jakarta

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi DKI
2017

Jakarta Tahun 2013 -